

KERAGAAN KELEMBAGAAN PENYULUHAN DALAM MENDUKUNG KEBERDAYAAN PETERNAK DI PEDESAAN

INSTITUTIONAL COMMUNITY COUNSELING IN SUPPORTING THE POWER OF RURAL FARMERS

Agustina Abdullah¹, Muh.Hatta Jamil², Jamila Mustabi¹, Aslina Asnawi¹

¹Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin Makassar

²Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin Makassar

Jl.Perintis Kemerdekaan Km.10 Tamalanrea, Makassar (90245) South Sulawesi

Corresponding e-mail : abdullah_ina@yahoo.com

ABSTRACT

Institutional counseling has a very large role in facilitating counseling in accompanying farmers, in order to be able to empower all its potential, spread new innovations on how to try to farm properly. The research aims to identify the institutional integrity of counseling in supporting the implementation of counseling for the power of farmers in rural areas. The research was conducted in Barru Regency of South Sulawesi Province. Determination of counselors as respondents is randomly calculated based on Slovin (Umar, 1997), with the number of respondents 44 counselors. Research data is collected by conducting surveys using the method of collecting interviews using questionnaires, focus group discussions, as well as in-depth interviews (indepth studies) to several key informants. The results showed that the implementation of counseling has clarity of vision, mission, objectives and institutional structure in the form of agencies, as well as the preparation of agricultural counseling programs at the sub-district level in line with the district's agricultural counseling program as well as the implementation of counseling based on the program is in a high category. (>50%), while the provision and dissemination of technology information, production facilities, financing and markets as well as institutional social networking counseling is still not optimally enabled. Therefore, efforts need to be made to improve and optimize to enable institutional counseling in accordance with its role in supporting counseling activities for the power of farmers in rural areas

Keywords: counseling institutions, powerlessness, breeders Terjemahan Inggris.

ABSTRAK

Kelembagaan penyuluhan mempunyai peran yang sangat besar dalam memfasilitasi penyuluh dalam mendampingi petani peternak, agar mampu memberdayakan semua potensinya, menyebarkan inovasi-inovasi baru tentang bagaimana berusaha tani dengan baik. Penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi keragaan kelembagaan penyuluhan dalam mendukung pelaksanaan penyuluhan untuk keberdayaan peternak di pedesaan. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan. Penentuan penyuluh sebagai responden secara acak yang dihitung berdasarkan

Slovin (Umar, 1997), dengan jumlah responden 44 orang penyuluh. Data penelitian dikumpulkan dengan melakukan survey dengan menggunakan teknik pengumpulan yaitu wawancara menggunakan kuesioner, focus group discussion, serta wawancara secara mendalam (*indepth study*) kepada beberapa informan kunci. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan penyuluhan memiliki kejelasan visi, misi, tujuan dan struktur kelembagaan dalam bentuk badan, begitupun dengan penyusunan program penyuluhan pertanian di tingkat kecamatan sejalan dengan program penyuluhan pertanian kabupaten serta pelaksanaan penyuluhan berdasarkan program berada pada kategori tinggi (>50%), sedangkan penyediaan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan dan pasar serta jejaring sosial kelembagaan penyuluhan masih kurang optimal difungsikan. Untuk itu perlu dilakukan upaya peningkatan dan optimalisasi untuk memfungsikan kelembagaan penyuluhan sesuai dengan perannya dalam mendukung kegiatan penyuluhan untuk keberdayaan petani peternak dipedesaan.

Kata kunci : keragaan,kelembagaan penyuluhan,keberdayaan, peternak

PENDAHULUAN

Kelembagaan penyuluhan mempunyai peran yang sangat besar dalam membantu penyuluh mendampingi petani, mengajarkan pengetahuan dan keterampilan tentang usahatani, mendidik petani agar mampu memberdayakan semua potensinya, menyebarkan inovasi-inovasi baru kepada petani tentang bagaimana berusaha tani dengan baik. Sehingga salah satu hal yang dapat menghambat rendahnya produktifitas usahatani ternak yang berdampak pada pendapatan dan keberdayaan peternak karena lemahnya kelembagaan penyuluhan.

Begitu besar peran kelembagaan penyuluhan dalam mendorong dan mengembangkan partisipasi dan keberdayaan pelaku utama dan pelaku usaha yang dibangun dengan landasan demokratis, transparan serta berkeadilan sesuai dengan amanah Undang-undang No. 16 Tahun 2006, tetapi kenyataannya di lapangan belum semua daerah memiliki pemaknaan dan pengertian yang sama tentang kedudukan dan fungsi kelembagaan penyuluhan pertanian. Studi yang dilakukan Sucihatiningih dan Waridin (2010), disebutkan bahwa masih banyak Kabupaten belum membentuk kelembagaan penyuluhan sesuai amanah undang-undang. Setiap daerah mempunyai pandangan berbeda tentang kelembagaan penyuluhan. Distorsi pemaknaan dan pengertian terhadap kedudukan dan fungsi kelembagaan penyuluhan pertanian yang berbeda tersebut menyebabkan beragamnya bentuk kedudukan dan struktur kelembagaan penyuluhan di daerah, sehingga pelaksanaan penyuluhan masih banyak mengalami peran dan fungsi yang tidak optimal sebagaimana yang diamanahkan oleh Undang-Undang. Begitupun pada tingkat implementasi hampir semua garis yang menghubungkan setiap komponen pada sistem tersebut masih belum fungsional karena berbagai macam sebab misalnya lemahnya kinerja penyuluh. Abdullah, (2017), menyatakan bahwa adanya penurunan kinerja penyuluh karena terkendala dengan sarana prasarana dan dana otonom yang rendah sehingga program program yang akan diimplementasikan kepada petani peternak tidak sesuai dengan kebutuhan, yang berdampak pada produktifitas usaha tani ternak, pendapatan, kualitas hidup peternak dan keberdayaan petani peternak di pedesaan. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi keragaan kelembagaan penyuluhan dalam mendukung pelaksanaan penyuluhan untuk keberdayaan petani peternak di pedesaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan. Penentuan penyuluh sebagai responden secara acak yang dihitung berdasarkan Slovin (Umar, 1997), dengan jumlah responden sebanyak 44 penyuluh. Data penelitian dikumpulkan dengan melakukan survey dengan menggunakan teknik pengumpulan yaitu wawancara menggunakan kuesioner. Kuesioner yang digunakan adalah kuesioner tertutup dan terbuka. Selain itu dilakukan pula focus group discussion dan wawancara secara mendalam (*indepth study*) kepada beberapa informan kunci.

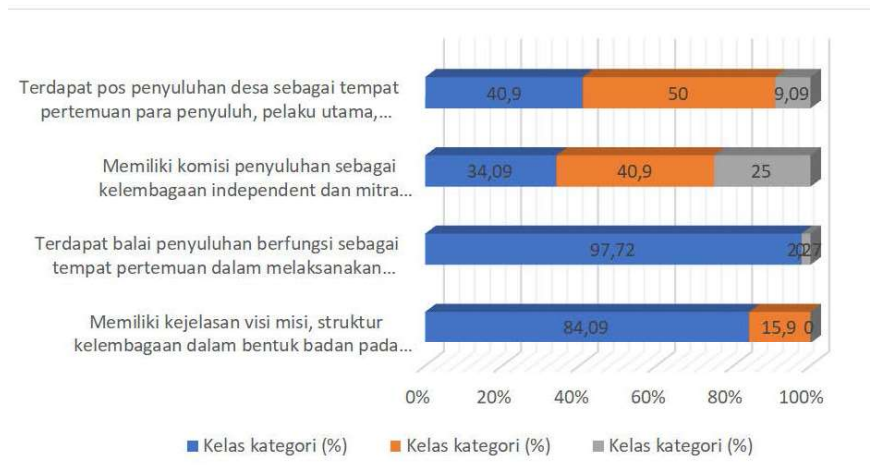
Pengukuran variabel penelitian dilakukan melalui pengukuran indikator setiap variabel/sub variabel penelitian yang bersangkutan. Untuk indikator variabel yang kualitatif diukur menggunakan skala likert yang masing-masing diberi skor 1, 2, dan 3. Pengukuran setiap indikator diperoleh dengan menarik nilai rata-rata dari skor seluruh parameternya. Pengukuran setiap variabel penelitian juga dilakukan melalui penarikan nilai rata-rata dari skor seluruh indikator dan sub variabel. Analisis data kondisi eksisting yang diperoleh dari survey diawali dengan melakukan tabulasi data, dan melakukan analisis deskriptif data dengan melihat rataan, persentase dan frekuensi yang diolah dengan bantuan menggunakan software SPSS.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keragaan Kelembagaan Penyuluhan

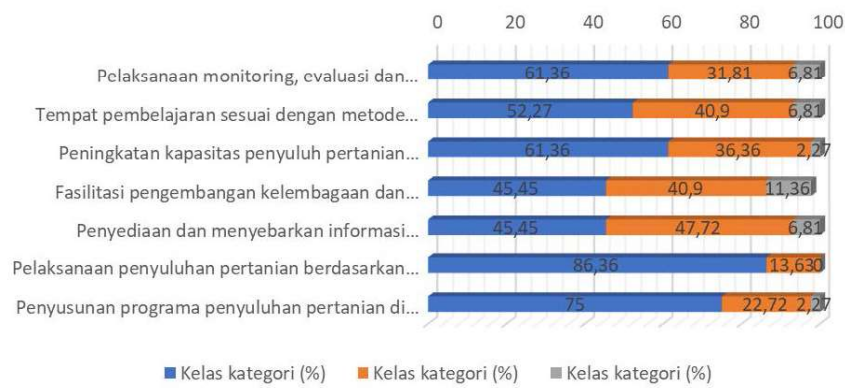
Kelembagaan Penyuluhan merupakan wadah penyuluh dalam lingkup pertanian untuk melakukan kegiatan penyuluhan. Kelembagaan penyuluhan ini telah mengalami berbagai perubahan, sehingga Tahun 2006 terjadi revitalisasi penyuluhan dimana kelembagaan penyuluhan di tingkat kabupaten dan kecamatan dihidupkan kembali yang dituangkan dalam UU No 16 Tahun 2006. Perubahan pada kelembagaan penyuluhan pertanian yang merujuk kepada paradigma desentralisasi menyebabkan adaptasi dan respons setiap daerah berbeda dan menjadi beragam dimana perbedaan tersebut terakomodasi pada tiga pilar, yaitu regulative, normative, dan cultural cognitive. Pada pilar *regulative*, keragaman muncul karena perbedaan interpretasi dalam memberikan kewenangan kegiatan penyuluhan pada tingkat kabupaten dan kecamatan yang dimanifestasikan kedalam masing-masing surat keputusan kepala daerah. Pada pilar *normative*, keragaman respons disebabkan semakin kuatnya otonomi dan persoalan yang dihadapi kelembagaan penyuluhan pertanian. Sedangkan pada pilar *cultural cognitive*, keragaman respons muncul akibat semakin kuatnya tuntutan masyarakat untuk mengedepankan kelembagaan lokal yang berbasis kultur setempat.

Berdasarkan wawancara dengan penyuluh menunjukkan bahwa kelembagaan penyuluhan pertanian di Kabupaten Barru memiliki bentuk terpusat yang berada pada Kantor Dinas Pertanian, dan sistem dan metode penyuluhan yang dilakukan pada penyuluh di Kabupaten Barru masih dominan menggunakan pertemuan di Kelompok Tani yang dihadiri oleh penyuluh. Sedangkan materi penyuluhan yang diberikan kepada petani telah disusun berdasarkan kebutuhan petani, dan penyampaian yang dilakukan penyuluh sudah komprehensif, walaupun materi penyuluhan yang diberikan kadang belum merupakan materi yang terkini terhadap teknologi yang berkembang. Untuk Pejabat struktural yang melayani kepentingan penyuluh sudah memahami secara penuh tugas-tugas penyuluhan, karena mempunyai latar belakang ilmu dibidang penyuluhan, sehingga gerakan penyelenggaraan penyuluhan terlihat secara nyata. Untuk lebih jelasnya tentang karakteristik kelembagaan penyuluhan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada Gambar 1, 2 dan 3.



Gambar 1. Karakteristik kelembagaan penyuluhan

Pada Gambar 1 menunjukkan bahwa , kelembagaan penyuluhan di Kabupaten Barru telah memiliki kejelasan visi, misi, tujuan, fungsi dan struktur kelembagaan dalam bentuk badan pada tingkat kabupaten, memiliki balai penyuluhan yang berfungsi sebagai tempat pertemuan dalam melaksanakan penyuluhan di tingkat kecamatan berada pada kategori skor tinggi, sedangkan fungsi kelembagaan penyuluhan dalam memfasilitasi komisi penyuluhan sebagai mitra pemerintah dan fasilitas pos penyuluhan sebagai tempat pertemuan para penyuluh dalam melakukan pelaksanaan penyuluhan berada pada kategori sedang, Hal ini disebabkan karena komisi penyuluhan sebagai lembaga independen yang memberikan aspirasi masyarakat belum melakukan sebagaimana mestinya, begitupun pada pembentukan posluh desa, penerapannya belum optimal dilakukan. Berbagai alasan yang dikemukakan responden yaitu kurangnya sarana prasarana dan alokasi dana yang kurang. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan Marwati (2015) bahwa Posluh desa belum berkembang disebabkan karena sosialisasi penumbuhan posluh desa masih kurang baik dan belum ada upaya penumbuhan secara mandiri karena alokasi dana posluh desa yang belum ada. Untuk kegiatan kelembagaan penyuluhan dalam pelaksanaan penyuluhan dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Karakteristik kelembagaan dalam pelaksanaan penyuluhan

Karakteristik kelembagaan penyuluhan dalam pelaksanaan penyuluhan seperti pada gambar 2 dapat dijelaskan bahwa penyusunan program penyuluhan pertanian di tingkat kecamatan sejalan dengan program penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten berada dalam kategori tinggi, begitupun dengan pelaksanaan penyuluhan berdasarkan program penyuluhan dengan persentase 75% dan 86%. Sedangkan penyediaan dan penyebaran informasi, teknologi, sarana produksi, pembiayaan dan pasar, fasilitas pengembangan kelembagaan dan kemitraan berada dalam kategori sedang dengan persentase masing-masing 45%. Sehingga dapat dikatakan bahwa kelembagaan penyuluhan belum memfasilitasi secara optimal dalam penyediaan informasi, teknologi dan sarana prasarana dan pasar, padahal dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 03 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian menyatakan penyuluhan pertanian merupakan proses pembelajaran terhadap pelaku utama dalam hal ini peternak dan keluarganya agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya. Untuk variabel karakteristik kelembagaan penyuluhan dalam peningkatan kapasitas penyuluh melalui proses pembelajaran, memiliki tempat pembelajaran yang sesuai dengan metode penyuluhan bagi peternak serta melakukan evaluasi dan monitoring dalam pelaksanaan penyuluhan berada pada kategori tinggi. Hal ini dapat dijelaskan bahwa kelembagaan penyuluhan di Kabupaten Barru telah memfasilitasi penyuluh dalam peningkatan sumberdaya manusia dalam proses pembelajaran melalui pendidikan dan pelatihan yang dilakukan di kantor Balai Penyuluhan Pertanian. Hal ini sesuai dengan Armstrong dan Taylor, (2013) menyatakan bahwa pengembangan sumber daya manusia (SDM) dilakukan melalui learning, yaitu proses di mana seseorang memperoleh dan mengembangkan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, perilaku dan sikap serta training yaitu, aplikasi sistematis dari proses formal untuk menanamkan pengetahuan dan membantu untuk memperoleh keterampilan yang diperlukan bagi peternak untuk melakukan usahataniya secara memuaskan.

Untuk karakteristik kelembagaan penyuluhan dalam berjejaring seperti pada Gambar 3.



Gambar 3. Kelembagaan Penyuluhan dalam jejaring sosial

Pada Gambar 3 dapat dijelaskan bahwa jejaring sosial dalam hal ini kerjasama kelembagaan penyuluhan dengan peneliti, pelaku agribisnis, pengembangan kelembagaan sosial ekonomi peternak, pengembangan kemitraan dengan dunia usaha serta interaksi dengan pihak luar masih berada dalam kategori sedang. Kurangnya kemitraan yang dilakukan pada kelembagaan penyuluhan dengan berbagai alasan yang disebutkan oleh responden yaitu masih minimnya sarana prasarana yang ada, kelebihan beban kerja penyuluh sehingga dengan adanya program

yang dicanangkan Kementerian Pertanian Tahun 2020 yaitu Kostratani sangat sesuai dalam mengoptimalkan tugas, fungsi dan peran Balai Penyuluhan Pertanian. Dimana salah satu peran dari kostratani yaitu “pusat pengembangan jejaring kemitraan”, yaitu mampu membangun kerja sama dan kemitraan usaha antar pelaku utama dan pelaku usaha dengan pihak/perusahaan mitra lainnya dalam pengembangan agribisnis untuk keberdayaan peternak di pedesaan,

KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa penyelenggaraan penyuluhan memiliki kejelasan visi, misi, tujuan dan struktur kelembagaan dalam bentuk badan, begitupun dengan penyusunan program penyuluhan pertanian di tingkat kecamatan sejalan dengan program penyuluhan pertanian kabupaten serta pelaksanaan penyuluhan berdasarkan program berada pada kategori tinggi (>50%), sedangkan penyediaan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan dan pasar serta jejaring sosial kelembagaan penyuluhan masih kurang optimal difungsikan. Untuk itu perlu dilakukan upaya peningkatan dan optimalisasi untuk memfungsikan kelembagaan penyuluhan sesuai dengan perannya dalam mendukung kegiatan penyuluhan untuk keberdayaan petani peternak di pedesaan

UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini merupakan bagian dari Program Penelitian Dasar Unhas (PDU), Untuk itu Penulis mengucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Hasanuddin atas bantuan dana penelitian melalui Program Penelitian Dasar Unhas (PDU) Tahun Anggaran 2020, sehingga penelitian ini dapat dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A, Jamila M, Amidah A, Aslina A, St.Nurlaelah. 2017. Analysis of The Determining Factors on The Performance of extension Officers For the transfer of Livestock Feed Technology American-Eurasian Journal of Sustainable Agriculture 11Number 5 sept-oct 2017.
- Armstrong, M., dan Taylor, S. 2013. Handbook of Human Resource Management Practice. 13th Edition. by Kogan Page Limited. USA
- Permentan No 3 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluh Pertanian
- Marwati, 2015. Penumbuhan dan Pengembangan Posludhes Sebagai Kelembagaan Penyuluhan Milik Petani. Cyber Extention, Kementerian Pertanian RI
- Sundari, 2015. Peran Penyuluh Pertanian Terhadap Peningkatan Produksi Usahatani Di Kabupaten Pontianak. Jurnal Social Economic of Agriculture, Volume 4, Nomor 1, April 2015
- Sucihatingsih, DWP dan Waridin. 2010. Model Penguatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluh Pertanian dalam Meningkatkan Kinerja Usahatani Melalui Transaction Cost (Studi Empiris di Provinsi Jawa Tengah). Jurnal Ekonomi Pembangunan. Volume 11 Nomor 1. p.13-29.
- Umar, H. 1997. Metodologi Penelitian : Aplikasi dalam Pemasaran. PT Gramedia, Jakarta
- Undang-Undang Republik Indonesia No 16. 2006. Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan. Republik Indonesia, Jakarta